

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *AGENCY COST***



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ETHA RIZKI ARYANI**

**NIM. C2C607059**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Etha Rizki Aryani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607059

Judul Skripsi **PENGARUH *GOOD CORPORATE*  
*GOVERNANCE* DAN STRUKTUR  
KEPEMILIKAN TERHADAP *AGENCY COST***

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara,. M.Si,. Akt

Semarang, 8 Juni 2011

Dosen Pembimbing

(Dr. Endang Kiswara,. M.Si,. Akt\_)

NIP 196902141994122001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Etha Rizki Aryani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607059

Judul Skripsi **PENGARUH *GOOD CORPORATE*  
*GOVERNANCE* DAN STRUKTUR  
KEPEMILIKAN TERHADAP *AGENCY COST***

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Juni 2011**

Tim Penguji:

1. Dr. Endang Kiswara., MSi., Akt (.....)

2. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt (.....)

3. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Etha Rizki Aryani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP AGENCY COST*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain, seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 8 juni 2011

Yang Membuat Pernyataan

Etha Rizki Aryani

C2C607059

## **ABSTRACT**

*This study examines the relationship between corporate governance, Ownership structure and agency cost measured in term asset turn over and operating expense, general expense and administration expense.*

*Collecting data using a purpose sampling method for non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2008 until 2009 and the company that include a list LQ-45. A total of 68 non-financial companies used as a sample. The method of analysis of this study used multiple regression.*

*The result of this study that the variable that affect agency cost is government ownership, institutional ownership and foreign ownership. While variables that did affect agency cost is board composition and concentrated ownership*

*Key word ; agency cost, corporate governance, government ownership, institutional ownership, foreign ownership and ownership concentration*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan biaya keagenan yang diukur dengan perputaran aktiva dan beban operasi, umum dan administrasi.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2009 dan perusahaan itu termasuk dalam LQ-45. Sebanyak 68 perusahaan non keuangan digunakan sebagai sampel. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi biaya keagenan adalah variabel kepemilikan BUMN, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi biaya keagenan adalah komposisi dewan dan kepemilikan terkonsentrasi .

Kata kunci : biaya keagenan, tata kelola perusahaan, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan terkonsentrasi

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *AGENCY COST*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir., M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Dr. Endang Kiswara., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro khususnya dosenpada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman tersayang Citra, Vita, Rembol, Wulan, Iwan, Rizka, Dewa, Anggi, Dini, Memey, Randy, Bimo, Ratna, Anisa, Tera, Novi, Vinda, Ochi dan Happy. Terima kasih atas waktu, saran, dan kritik kalian selama ini
7. Nino Stya Prabowo, terima kasih untuk waktu, semangat, motivasi dan selalu setia dan menjadi pendengar yang baik.
8. Teman-teman KKN desa Ngasem, Aan, Ikhsan, Paris, Priska, Daniel, Nanik, Tintin, Suryo dan Tya. Terima kasih untuk kenangan yang indah selama sebulan disana.
9. Mas Imam TU dan seluruh petugas TU yang telah memberikan banyak bantuan, semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 8 Juni 2011

Penulis

Etha Rizki Aryani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8

2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	8
2.2 <i>Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan).....	10
2.2.1 Komposisi dewan .....	15
2.3 Struktur Kepemilikan .....	16
2.3.1 Kepemilikan Institusional .....	18
2.3.2 Kepemilikan Asing .....	20
2.3.3 Kepemilikan terkonsentrasi .....	20
2.3.4 Kepemilikan BUMN .....	21
2.4 Agency Cost (Biaya keagenan).....	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Pemikiran .....	26
2.7 Pengembangan Hipotesis.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	34
3.1.1 Variabel Terikat .....	34
3.1.2 Variabel Bebas.....	35
3.1.3 Variabel Kontrol .....	37
3.2 Populasi dan Sampel .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5 Metode Analisis .....	42

3.5.1 Analisis Multivariate.....	43
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	43
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	44
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas .....	45
3.5.2.3 Uji Autokorelasi .....	45
3.5.3 Analisis Regresi Berganda .....	46
3.5.4 Pengujian hipotesis.....	47
3.5.4.1 Uji Parsial (Uji-t).....	48
3.5.4.2 Uji F.....	48
3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	49
<b>BAB IV</b> <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Deskriptif Objek Penelitian .....	50
4.2 Analisis Data.....	50
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	51
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	55
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	55
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas .....	57
4.2.2.3 Uji Autokolerasi .....	60
4.3 Hasil Uji Hipotesis .....	61
4.3.1 Hasil Uji F.....	61
4.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63

	4.3.3 Hasil Uji t.....	65
	4.4 Interpretasi Hasil.....	75
BAB V	PENUTUP .....	80
	5.1 Kesimpulan .....	80
	5.2 Keterbatasan Penelitian .....	83
	5.3 Saran .....	84
	DAFTAR PUSTAKA .....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	88

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	40
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian .....	50
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji MultikolonieritasModel 1 .....	58
Tabel 4.5 Hasil Uji MultikolonieritasModel 2 .....	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji F(F-test) Model 1 .....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji F(F-test) Model 2.....	63
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi Model 1.....	64
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi Model 2.....	65
Tabel 4.11 Hasil Uji t (t-test) Model 1 .....	66
Tabel 4.12 Hasil Uji t (t-test) Model 2.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A: Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	88
Lampiran B : Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS Versi 17.....	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merupakan suatu proses dan tata kelola yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan. Pada prinsipnya *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) menyangkut kepentingan para pemegang saham yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap *stakeholder*, termasuk di dalamnya yaitu *shareholders, lenders, employers, executives, government, customers* dan *stakeholders* yang lain (Theresia, 2005).

Kunci mekanisme *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang mencakup kepemilikan (baik institusional dan manajerial), dewan direksi (termasuk struktur dewan), keterbukaan keuangan, dan pasar untuk kontrol perusahaan. Inggris *Cadbury Report* (1992) merekomendasikan bahwa perusahaan harus mengadopsi kode model praktik *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan), dan menekankan pentingnya mekanisme kontrol. Permasalahan yang sering timbul dalam *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan tata kelola perusahaan sehingga timbul konflik keagenan (*agency conflict*) yaitu

adanya perbedaan kepentingan antara pihak principal (pemilik) dan agen (manajer) yang memicu terjadinya *agency cost* serta mengabaikan kepentingan investor, yang mana akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor termasuk investor asing yang biasanya dikenakan biaya keagenan yang lebih tinggi. Tipe lain dari biaya keagenan dapat timbul ketika pemegang saham yang dominan untuk mengambil tindakan yang mengambil alih kekayaan investor minoritas, karena seringkali *controlling shareholders* mengendalikan keputusan manajemen yang merugikan *minority shareholders*. Kondisi ini terjadi karena *asymmetry information* antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen ( Firth, *et al.*, 2008).

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham jadi *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan (Faisal, 2004). Diantaranya struktur kepemilikan meliputi struktur kepemilikan BUMN, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional.

Kepemilikan BUMN adalah struktur yang digunakan oleh organ BUMN agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Firth, *et al.*, 2008).). Kepemilikan saham melalui institusi ini yang paling disukai investor karena dengan ini mereka tidak dapat dengan mudah ditipu oleh manajer. Karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga sebagai cara untuk mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer.

Mekanisme struktur kepemilikan lain adalah kepemilikan asing menurut Chibber dan Majumdar (1999) semakin meningkatnya kepemilikan asing di dalam perusahaan maka makin meningkat pula kinerja perusahaan. Investor asing menghadapi resiko yang cukup besar, terutama ketika berinvestasi di negara-negara dalam masa transisi.

Struktur pemilikan saham yang lain adalah kepemilikan terkonsentrasi yaitu kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh pemegang saham mayoritas dimana pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk memonitor dan cukup informasi untuk mengasumsikan fungsi pengawasan. Sehingga pemegang saham minoritas tidak mempunyai kekuatan dan tidak dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan (Said, *et. al.*, 2009.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan masalah agensi yang akan menimbulkan *agency cost*. Dalam konteks perusahaan, masalah

agensi lebih menaruh perhatian pada hubungan antara manajer dengan pemegang saham yang tidak terlibat di manajemen, sedangkan *corporate governance* melihat hubungan antara manajer dan seluruh *stakeholders* perusahaan. *Corporate governance* (tata kelola perusahaan) memiliki prinsip adanya transparansi, keterbukaan dan pertanggungjawaban sehingga perusahaan yang baik semestinya akan dapat mengurangi masalah agen. Melihat keterkaitan antara masalah agensi dan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) tersebut, nampaknya efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi akan dipengaruhi oleh bagaimana praktik *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di masing – masing perusahaan. Penelitian ini berupaya untuk menguji dugaan tersebut dalam konteks permasalahan agensi di perusahaan *go public* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dan struktur kepemilikan dapat mempengaruhi *agency cost* yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)* dan Struktur Kepemilikan terhadap *Agency Cost (Biaya Keagenan)*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah “Pengaruh *Corporate*

*Governance* (Tata Kelola Perusahaan) dan Struktur Kepemilikan terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)”. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dapat mempengaruhi *agency cost* (*biaya keagenan*)?
2. Apakah struktur kepemilikan dapat mempengaruhi *agency cost* (*biaya keagenan*)?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi titik tolak maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh *corporate governance* (tata kelola perusahaan) terhadap *agency cost* (*biaya keagenan*).
2. Untuk menganalisis adanya pengaruh positif struktur kepemilikan terhadap *agency cost* (*biaya keagenan*), khususnya pada kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan asing.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain :

1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) dan struktur kepemilikan pemerintah, kepemilikan

institusional, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan asing *agency cost* (*biaya keagenan*) dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dibidang akuntansi dimasa yang akan datang

2. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teori, terutama berkaitan dengan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) dan *agency cost* (*biaya keagenan*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini merupakan pendahuluan yang merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang penelitian secara garis besar, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

BAB ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan landasan teori yang melandasi dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam bagian ini juga di jelaskan mengenai penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini. Selain itu Bab ini juga menggambarkan

kerangka teoritis yang digunakan untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang Metode Penelitian yang menguraikan tentang metode yang digunakan dan juga membahas variabel-variabel penelitian dan pengukurannya, dan penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

BAB ini berisi tentang Hasil dan Analisis yang akan membahas dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *corporate governance*, struktur kepemilikan dan biaya agensi.

### BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini yang menjawab pertanyaan penelitian serta keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Untuk memahami *corporate governance* (tata kelola perusahaan) maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976),

Teori Keagenan dalam perkembangannya terbagi menjadi dua aliran menurut Jensen and Meckling, (1976) meliputi : (1) *Positive Theory of Agency*, teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah yang membatasi self saving dalam diri agen. (2) *Prinsipal Agen Literature*, memfokuskan pada kontrak optimal

antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agen.

Menurut Eisenhard (1989) teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis *asymmetric information*, yaitu: *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen

bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa, oleh karena itu, masalah keagenan muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik saham perusahaan dengan manajer investasi sebagai agen. Pemegang saham sebagai penyedia dana dan fasilitas, memiliki kepentingan mengamankan dana dan fasilitas tersebut atas operasi perusahaan karena pemegang saham berkepentingan atas keamanan dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. Manajer sendiri sebagai pengelola perusahaan mendapatkan gaji dari perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil manajer diharapkan dapat memakmurkan pemegang saham dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem tata kelola yang baik pada perusahaan yang disebut dengan *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) Menurut Theresia (2005) menyatakan bahwa *corporate governance* (tata kelola perusahaan) merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

## **2.2 *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)**

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham

(*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*). (Tjager *et.al*, 2005)

*Shareholding theory* mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Sementara itu, *Stakeholding theory*, diperkenalkan oleh Freeman (2005), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Sementara itu, menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) *Corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Salah satu prinsip *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah menyangkut peranan dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan Kontinental Eropa (FCGI, 2001a).

Pada Indonesia, *Code Of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional *Corporate Governance* terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu:

1. ***Transparency (keterbukaan informasi)***

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.

2. ***Accountability (akuntabilitas)***

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan

3. ***Responsibility (pertanggung jawaban)***

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

4. ***Independency (kemandirian)***

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. ***Fairness (kesetaraan dan kewajaran)***

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

tujuan organisasi.

Berdasarkan kerangka aturan dan peraturan berlaku. Selain itu, mekanisme *corporate governance* (tata kelola perusahaan) juga dapat membawa beberapa manfaat (FCGI, 2001) antara lain:

1. meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders' values* dan dividen.

Esensi dari *corporate governance* (tata kelola perusahaan) adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

### **2.2.1 Komposisi Dewan**

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)*, Dewan Komisaris merupakan inti *corporate governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Menurut Sembiring (2003) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer (CEO)* dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari persepektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Wahyudi., 2010).

### 2.3 Struktur Kepemilikan

Masalah *corporate governance* (tata kelola perusahaan) merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti (1).Kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi (Gilberg dan Idson, 1995). (2) Kepemilikan terkonsentrasi (*closely held*). Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling interest* dan *minority interest (shareholders)*. Sifat masalah keagenan secara langsung berhubungan dengan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang tersebar tidak akan memberikan insentif kepada pemilik untuk memonitor pengelolaan manajemen. Hal ini disebabkan para pemilik akan menanggung sendiri biaya pengawasan (*monitoring cost*), sehingga semua pemilik akan menikmati manfaat. Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada investor. Peranan itu terjadi disebabkan karena investor institusi merupakan investor yang *sophisticated*, dan mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu. (3) Kepemilikan dalam BUMN. Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk (misalnya menteri).

Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditor .

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004) jadi *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Karena dengan adanya struktur kepemilikan yang terstruktur, dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governanc* (tata kelola perusahaan) yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Beberapa penelitian mengenai struktur kepemilikan dilakukan oleh Crutchley *et al* (1999) dengan membangun sebuah model yang menunjukkan empat keputusan yang saling terkait menyangkut *leverage*, *dividend*, *insider ownership*, dan *institutional ownership* ditentukan secara simultan dalam kerangka *agency cost*. Penelitian Crutchley *et al* (1999) memberikan bukti bahwa ada keterkaitan antara keputusan *leverage*, *dividend payout ratio*, *insider ownership*, dan *institutional ownership* yang ditentukan secara simultan meskipun tidak menyeluruh. Pada penelitiannya Crutchley *et al* (1999) juga membuktikan bahwa kepemilikan institusional merupakan substitusi kepemilikan manajerial.

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan menurut Wahyudi dan Pawestri,

(2010). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik

### **2.3.1 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. (Tarjo, 2008). Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Menurut Barnea dan Rubin (2005), bahwa *institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi

manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Penelitian Suranta dan Midiastuty, menunjukkan bahwa aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini didukung oleh Cruthley *et al* (1999) yang menemukan bahwa *monitoring* yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat.

### **2.3.2 Kepemilikan Asing**

Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas. (Xiao *et al.*, 2004)

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Investor asing menghadapi risiko yang cukup besar, terutama ketika

berinvestasi di negara-negara dalam transisi. Ini termasuk resiko politik, informasi asimetris dan perlindungan hukum (Laporta *et al*, 1999.). Di satu sisi, investor asing bisa tekanan perusahaan untuk menjadi efisien dan untuk mengurangi biaya keagenan Di sisi lain, bagaimanapun, jarak geografis dan ketidaktahuan kondisi lokal dapat membuat para pemegang saham asing kurang berpengaruh dalam pengelolaan dan pemantauan, karena itu, tidak mengurangi biaya keagenan (Boardman et al. 1994).

### **2.3.3 Kepemilikan Terkonsentrasi**

Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk yaitu, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar.

Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan. Sebaliknya, kepemilikan menyebar adalah jika kepemilikan saham secara relatif merata ke publik tidak adayang memiliki saham dalam jumlah sangat besar. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan

untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. (Ningsaptiti, 2010)

#### **2.3.4 Kepemilikan saham terhadap BUMN**

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, *Corporate governance* (tata kelola perusahaan) merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Karena *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya

Hamzah, Achmad Rusyaidi (2010) menyimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Sementara itu dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara pasal 4, ayat 1 adalah Penerapan *good corporate governance* pada BUMN, bertujuan untuk :

- a) memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
- b) mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ;
- c) mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d) meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e) meningkatkan iklim investasi nasional;
- f) mensukseskan program privatisasi.

## 2.4 *Agency Cost (Biaya Keagenan)*

Dengan Adanya masalah agensi yang disebabkan karena masalah kepentingan dan adanya assimetri informasi hal ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

- (a) *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*
- (b) *The bonding expenditures by the agent*. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mangambil banyak tindakan.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya *agency relationship*.

Menurut Ang et al. (2000), menggunakan beban jumlah operasi, umum dan administrasi (OGA). Variabel ini mengukur *agency cost* (biaya keagenan) berdasarkan rasio beban operasi, umum dan administrasi terhadap total penjualan. rasio beban operasi, umum dan administrasi merefleksikan diskresi manajerial dalam membelanjakan sumber daya perusahaan semakin tinggi semakin tinggi beban diskresi manajerial semakin tinggi *agency cost* (biaya keagenan) yang terjadi.

Cara pengukuran yang kedua untuk *agency cost* (biaya keagenan) adalah perputaran aset rasio (Asset turn over), yang didefinisikan sebagai penjualan dibagi dengan aset. Cara pengukuran ini digunakan oleh Ang et al. (2000) yaitu Perusahaan dengan rasio turnover yang tinggi mencerminkan aktiva dalam-pemanfaatan sumber daya dan semakin produktif asset tersebut digunakan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Menurut Jensen dan Meckling, 1976 kepemilikan manajerial Tinggi telah menganjurkan sebagai cara untuk *agency cost* (biaya keagenan) dan jumlah pemegang saham semakin menyebar, menyebabkan kekuatan para pemegang saham untuk mengontrol manajemen menjadi lebih rendah dan hal ini dapat menimbulkan *agency cost* (biaya keagenan) yang tinggi.

Crutchley *et al.* (1999) menyatakan bahwa kepemilikan institusional juga dapat menurunkan *agency cost* (biaya keagenan) karena dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional.

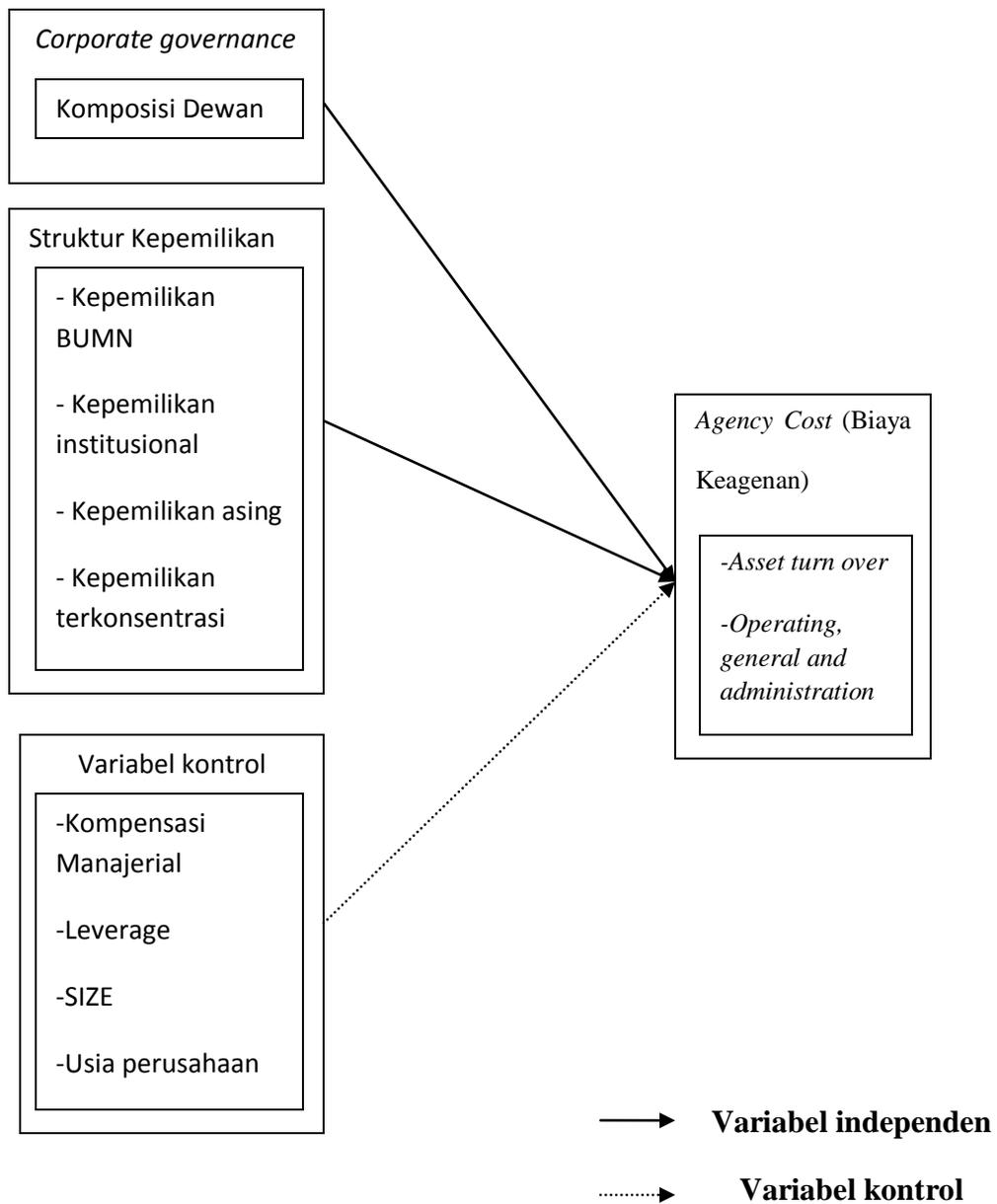
Lin *et al.* (1999) berpendapat bahwa dalam tidak adanya pemegang saham pengendali, sehingga tidak mungkin untuk memantau kegiatan pengelolaan. Dalam

hal ini, intervensi pemerintah yang aktif mungkin diperlukan. Sehingga hal ini dapat mengurangi *agency cost* (biaya keagenan)

Menurut Firth *et al.* (1999) berpendapat bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dengan kepemilikan asing melibatkan *agency cost* (biaya keagenan) yang tinggi. Dengan demikian, pengaruh asing tidak memperpanjang untuk memonitor manajemen oleh karena itu hal ini dapat mengurangi *agency cost*.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Good Corporate Governance* (Tata kelola Perusahaan) dan Struktur Kepemilikan terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)



## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)**

Isu *corporate governance* (tata kelola perusahaan) sesungguhnya sudah lama dikenal di negara-negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai agen (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan pemilik dan manajemen ini, dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan).

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*), karena dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen.

Dengan Adanya masalah agensi yang disebabkan karena masalah kepentingan dan adanya asimetri informasi hal ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*), yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

- (a) *The monitoring expenditures by the principle*. Biaya monitoring dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*
- (b) *The bonding expenditures by the agent*. The bonding cost dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau untuk menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
- (c) *The residual loss* yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship.

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI), Inti dari *corporate governance* adalah Dewan Komisaris merupakan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan pencurian asset yang berdampak pada kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang

dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*. (tata kelola perusahaan yang baik)

Dengan di terapkannya *corporate governance* (tata kelola perusahaan) sebagai system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kekayaan pemegang saham (pemilik). Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik keagenan dan meminumkan biaya keagenan.

H<sub>1a</sub>: Adanya pengaruh negatif antara komposisi dewan dengan *agency cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *assets turn over (ATO)*

H<sub>1b</sub> : Adanya pengaruh negatif antara komposisi dewan dengan *agency cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *Operating, general and administration (OGA)*

### **2.7.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan BUMN terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)**

Masalah *corporate governance* merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya berpendapat bahwa BUMN cenderung untuk menekankan tujuan politik daripada efisiensi ekonomi dan tidak bisa mengatasi

dengan muncul persaingan dari perusahaan non-negara (Naughton, 1995). Shleifer dan Vishny (1994) berpendapat bahwa inefisiensi perusahaan negara adalah karena peneleaan tujuan selain memaksimalkan keuntungan. Setelah argumen ini, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan pemerintah kurang efisien dan menghadapi biaya keagenan yang lebih tinggi. Namun, ada menentang pandangan tersebut Lin et al (1999) berpendapat bahwa dalam tidak adanya pemegang saham pengendali, otonomi manajerial mengembang dan tidak mungkin untuk memantau kegiatan pengelolaan..

H<sub>2a</sub> : Adanya pengaruh negatif antara strukrur kepemilikan BUMN dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *assets turn over (ATO)*

H<sub>2b</sub> : Adanya pengaruh negatif antara strukrur kepemilikan BUMN dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *Operating, general and administration (OGA)*

### **2.7.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)**

Menurut Faizal (2004), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan

mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* (Biaya Keagenan) yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

H<sub>3a</sub> : adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *assets turn over (ATO)*

H<sub>3b</sub> : adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *Operating, general and administration (OGA)*

#### **2.7.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing terhadap Agency Cost (Biaya Keagenan)**

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance* (Simerly & Li, 2001; Fauzi, 2006). Perusahaan dengan kepemilikan saham asing lebih dominan menghadapi masalah asimetri informasi yang di karenakan oleh factor hambatan geografis dan bahasa. Ini termasuk resiko politik, informasi asimetris dan perlindungan hukum (Laporta *et al*, 1999.).

Douma *et al* (2003) mengkaji bagaimana struktur kepemilikan, yaitu peran berbeda yang dimainkan oleh investor individu asing dan pemegang saham perusahaan asing dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, dengan menggunakan data tingkat perusahaan India untuk tahun 2002. Mereka menemukan perusahaan-perusahaan asing memberikan efek positif pada kinerja perusahaan.

Di satu sisi, investor asing bisa tekanan perusahaan untuk menjadi efisien dan untuk mengurangi biaya keagenan Di sisi lain, bagaimanapun, jarak geografis dan ketidaktahuan kondisi lokal dapat membuat para pemegang saham asing kurang berpengaruh dalam pengelolaan dan pemantauan, karena itu, tidak mengurangi *Agency Cost* (Biaya Keagenan) (Boardman et al. 1994)

H<sub>4a</sub> : Adanya pengaruh negatif antara struktur kepemilikan asing dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *assets turn over (ATO)*

H<sub>4b</sub> : Adanya pengaruh negatif antara struktur kepemilikan asing dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *Operating, general and administration (OGA)*

### **2.7.5 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan)**

La Porta *et al.* (1999) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara tingkat *corporate governance* yang rendah. Tingkat *corporate governance* yang rendah juga terjadi di Indonesia.

Struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi merupakan cara efektif untuk menurunkan biaya agensi serta melakukan proses monitoring yang baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer. Melalui proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap

manajemen dapat berjalan dengan baik dari tindakan opportunities manajemen untuk menyembunyikan informasi yang relevan.

H<sub>5a</sub> : adanya pengaruh negatif antara struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *assets turn over (ATO)*

H<sub>5b</sub>: Adanya pengaruh negatif antara struktur kepemilikan terkonsentrasi dengan *Agency Cost* (Biaya Keagenan) yang diukur dengan *Operating, general and administration (OGA)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi dan Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel terikat (Dependen)**

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah biaya agensi yang akan diukur melalui dua cara yaitu cara pertama dengan menggunakan jumlah operasi, umum dan administrasi (OGA) diskalakan dengan total penjualan sebagai ukuran proxy untuk biaya agensi. Operasi, umum dan administrasi dikeluarkan dalam rangka untuk membantu kegiatan penjualan, dan untuk mengatur dan mengelola operasi dan produksi, yang meliputi biaya yang dikeluarkan oleh dewan direksi. Cara pengukuran yang kedua adalah dengan menggunakan perputaran aset rasio (Assets Turn Over), yang didefinisikan sebagai penjualan dibagi dengan aset. Karena Perusahaan dengan perputaran aset rasio yang rendah mencerminkan aktiva dalam-pemanfaatan sumber daya dan investasi dalam aktiva produktif.

Peneliti menyesuaikan rumus tersebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan demikian, rumus yang digunakan untuk OGA dan ATO menggunakan rumus sebagai berikut (Ang et al. (2000),

$$\text{OGA} = \frac{\text{jumlah beban operasi, umum dan administrasi/beban}}{\text{Total penjualan}} \quad (3.1)$$

$$\text{ATO} = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Aset}} \quad (3.2)$$

### **3.1.2 Variabel bebas (independen)**

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan beberapa variabel independen.

#### **3.1.2.1 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)**

Elemen dari *Corporate governance* (Tata Kelola Perusahaan) adalah komposisi dewan yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

##### **3.1.2.1.1 Komposisi Dewan Komisaris**

Komposisi dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam suatu perusahaan. ukuran dewan komisaris di hitung dengan menggunakan variabel dummy dimana Proporsi dewan komisaris independen yang tercantum di laporan keuangan diberi nilai 1 jika persentase dewan komisaris independen yang tercantum dilaporan keuangan lebih banyak namun apabila ukuran dewan komisaris independen lebih sedikit maka di beri nilai 0,5.

### **3.1.2.2 Struktur Kepemilikan**

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat pengukuran yaitu kepemilikan BUMN, kepemilikan institusional, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan asing. Variabel ini digunakan untuk mempengaruhi manfaat struktur kepemilikan dalam mekanisme pengurang masalah keagenan yang nantinya berpengaruh terhadap biaya agensi.

#### **3.1.2.2.1 Kepemilikan BUMN**

*Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN agar dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Kepemilikan saham terhadap BUMN dapat diukur dengan Kepemilikan saham pada industri BUMN, sama dengan 1 jika Negara memegang lebih dari atau sama dengan kepemilikan saham utama

#### **3.1.2.2.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional yaitu antara lain mencakup bank, perusahaan asuransi,

perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Apabila kepemilikan saham oleh institusi lebih besar atau sama dengan saham yang beredar maka di beri nilai 1.

#### **3.1.2.2.3 Kepemilikan Asing**

Kepemilikan asing adalah kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan yang ada di Indonesia Apabila kepemilikan saham oleh pihak asing lebih besar atau sama dengan saham yang beredar maka di beri nilai 1.

#### **3.1.2.2.4 Kepemilikan Terkonsentrasi**

Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan saham di katakan terkonsentrasi apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham utama yaitu kepemilikan saham yang besarnya lebih dari 50 % hak suara pada suatu perusahaan. kepemilikan saham terkonsentrasi di ukur dengan Jumlah kuadrat kepemilikan saham proporsional dari tiga pemegang saham terbesar di perusahaan.

### **3.1.3 Variabel Kontrol**

#### **3.1.3.1 Kompensasi Manajerial**

kompensasi manajerial dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Sebuah kompensasi yang baik dan skema reward untuk memberikan manajer insentif untuk meningkatkan efisiensi dan menghentikan pengeluaran dan nilai tambah kegiatan non perusahaan.

Kompensasi manajerial di ukur dengan jumlah kompensasi tertinggi yang di berikan oleh dewan komisaris.

### **3.1.3.2 Leverage**

Leverage yang di maksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa utang dapat berguna dalam mengurangi konflik keagenan. Leverage mengurangi biaya agen dengan mengurangi arus kas yang tersedia untuk digunakan oleh manajemen (Jensen, 1986).. Grossman dan Hart (1982) berpendapat bahwa keberadaan manajer yang mengandalkan utang adalah kekuatan untuk mengkonsumsi lebih sedikit dan menjadi lebih efisien, karena mengurangi kemungkinan kebangkrutan dan hilangnya kontrol. Rasio leverage di ukur dengan membagi total utang dengan total ekitas yang ada di perusahaan. Leverage dapat di hitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100 \% \quad (3.3)$$

### **3.1.3.3 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dapat di ukur berdasarkan total asset yang ada di laporan keuangan dan tercantum di laporan keuangan tahunan. Ukuran perusahaan yang di ukur dengan total asset akan di ubah dengan bentuk logaritma. Hal ini bertujuan agar menyamakan dengan variabel lainnya. Karena nilai asset perusahaan relative lebih

besar di banding dengan variabel-variabel lain. Ukuran perusahaan di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{SIZE} = \text{Log} (\text{nilai buku total asset}) \quad (3.5)$$

#### **3.1.3.4 Usia perusahaan**

Usia perusahaan di gunakan sebagai variabel kontrol yang didasarkan pada argumen bahwa perusahaan dewasa lebih efisien daripada perusahaan yang lebih muda (Ang et al, 2000.). Usia perusahaan dapat di ukur berdasarkan usia perusahaan sejak pertama kali terdaftar dalam bursa efek Indonesia.

**TABEL 3.1****Tabel definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala pengukuran</b>
<b>Independent:</b>			
<i>GCG (X)</i>	Komposisi Dewan	Jumlah komisaris independen dan non independen	Nominal
<i>Struktur kepemilikan (X)</i>	Kepemilikan BUMN	Jumlah saham yang dimiliki industri BUMN	Nominal
	Kepemilikan institusional	Jumlah saham yang dimiliki pihak institusi	Nominal
	Kepemilikan asing	Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing	Nominal
	Kepemilikan terkonsentrasi	Jumlah saham yang dimiliki oleh 3 pemegang saham terbesar	Nominal
<b>dependen</b>			
<i>Biaya keagenan (Y)</i>	Assets turn over(ATO)	Jumlah total penjualan dibagi total aset	Rasio

	Operating, general and administration(OGA)	Jumlah beban operasional dibagi total asset	Rasio
<b>control</b>	-Kompensasi manajerial	Jumlah kompensasi yang diberikan perusahaan	Nominal
	-Leverage	Total utang dibagi total equitas	Rasio
	-SIZE	Hasil log jumlah total asset	Nominal
	-Umur perusahaan	Usia dimana pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Nominal

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di LQ-45. Periode penelitian dilakukan dari tahun 2008 -2009. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria -kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu: (1) Perusahaan yang telah terdaftar di di LQ-45 sebelum tahun 2008-2009 sehingga tersedia data yang lengkap, (2) Perusahaan yang memiliki

data dewan komisaris, (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode 2008-2009.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan berupa nilai rata-rata dari tahun 2008-2009. Data sekunder diperoleh dari Pojok BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* tahun 2009-2010.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan non keuangan yang terdaftar di termasuk daftar LQ-45 tahun 2008-2009 dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* tahun 2009-2010..

## **3.5 Metode Analisis Data**

### **3.5.1 Analisis Multivariate**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis multivariate sebagai metode analisis data karena analisis multivariat ini adalah suatu metode statistik untuk set data dengan lebih dari satu variabel bebas dan lebih dari satu variabel terikat. Metode statistik untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat (metrik) dan satu atau lebih variabel bebas (metrik) adalah regresi. Sementara itu untuk menguji pengaruh satu variabel bebas (metrik) terhadap variabel terikat adalah regresi sederhana. Sedangkan untuk lebih dari variabel bebas (metrik) disebut regresi berganda. Sebelum menguji apakah dalam penelitian ini termasuk dalam metode regresi berganda maka dilakukan beberapa uji seperti uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji Heteroskedastisitas.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus di penuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokidastisitas. Karena hal ini untuk menghindari untuk menghindari estimasi bias mengingat semua data tidak dapat di terapkan dalam regresi berganda. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda dimana analisis ini mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2005). Oleh karena itu perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari :

### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendekati apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic (Ghozali, 2005). Alat uji yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probably plot yaitu jika tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal maka uji ini memenuhi syarat uji normalitas, yang kedua jika tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah diagonal maka uji ini tidak memenuhi syarat uji normalitas uji statistik selanjutnya adalah uji statistik Kolmogrov-Smirnov yaitu jika nilai asymp sig 2 tailed kurang dari 0,05 maka  $H_0$  di tolak yang artinya data residual terdistribusi tidak normal namun apabila jika nilai asymp sig 2 tailed lebih dari 0,05 maka  $H_0$  di terima yang artinya data residual terdistribusi tidak normal.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari: (1) *tolerance value*, (2) nilai *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau VIF di bawah 10 (Ghozali, 2005). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance  $<0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  (Ghozali, 2006).

### 3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2009). Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mendekteksi ada atau tidaknya kolerasi yaitu sebagai berikut:

1. Uji Durbin – Watson (DW-test)
2. Uji Lagrange Multipler (LM test)
3. Uji Statisitik Q
4. Mendeteksi Autoklerasi dengan Run Test

### 3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut. Adapun tahap – tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut :

1. menghitung karakteristik komponen dari GCG dalam perusahaan yang diprosikan dalam ukuran dewan komisaris, serta kepemilikan managerial kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan terkonsentrasi.
2. Menghitung *agency cost* (biaya keagenan) yang diungkapkan melalui data – data operasional perusahaan dalam laporan tahunan (*annual reports*).
3. Penghitung model regresi

Metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diterapkan oleh peneliti dengan menggunakan software SPSS versi 17.0 untuk memprediksi hubungan antara variable independen dengan variable dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dan struktur kepemilikan dengan *agency cost* diukur dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Agency Costs}_i = & \alpha_i + \beta_1 \text{ komp.dewan}_{it} + \beta_2 \text{ BUMN}_{it} + \beta_3 \text{ inst.}_{it} + \beta_4 \text{ asing}_{it} + \beta_5 \\ & \text{terkonsentrasi}_{it} + \beta_6 \text{ kompensasi.manaj.}_{it} + \beta_7 \text{ leverage}_{it} + \beta_8 \\ & \text{SIZE}_{it} + \beta_9 \text{ Usia}_{it} + \varepsilon_i \end{aligned} \tag{3.6}$$

keterangan :

Agency Costs <sub>i</sub>	= indeks dari biaya keagenan perusahaan <sub>i</sub>
komp.dewan	= ukuran Komposisi Dewan
BUMN	= presentase kepemilikan BUMN
Inst.	= presentase kepemilikan institusional
Asing	= presentase kepemilikan asing
terkonsentrasi	= presentase kepemilikan terkonsentrasi
kompensasi.manaj	= ukuran kompensasi managerial
leverage	= rasio leverage ( <i>debt to equity ratio</i> )
SIZE	= ukuran perusahaan diukur dengan log total aset
Usia	= ukuran usia perusahaan
$\varepsilon_i$	= <i>error term</i>

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan uji dua arah dengan hipotesis:

$H_0 : X_i = 0$ , artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variable independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : X_i \neq 0$ , artinya ada pengaruh secara signifikan dari variable independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian ditetapkan sebagai berikut:

1. Jika nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima.
2. Jika nilai  $t_{hitung}$  atau  $t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.
3. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika  $P$  (probabilitas)  $> 0,05$  maka dinyatakan tidak signifikan.

#### **3.5.4.2 Uji Hipotesis Secara Serempak (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersamaan atau simultan terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan dalam model tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sedangkan  $H_1$  menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai  $f$  dihitung lebih besar daripada  $f$  tabel, maka  $H_0$  dapat ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika  $f$  dihitung lebih kecil daripada  $f$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Bila berdasarkan nilai probabilitas, maka probabilitas  $> 0,05$  ( $< 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima (ditolak).

#### **3.5.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Nilai  $R^2$  berada di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel terkait (Ghozali, 2006). Dapat juga dikatakan bahwa  $R^2=0$  berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, sedangkan  $R^2=1$  menandakan suatu hubungan yang sempurna.